Tourism and Hospitality Research
Vol. 1 No. 1, September 2025, pages: 23-29
e-ISSN XXXX-XXXX | DOI: https://doi.org/10.70716/thr.v1i1.56

Peran Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Fariz Ardhiatma
Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia
**Corresponding Author: fariz.ardhiatma@student.unram.ac.id*

Article History

Manuscript submitted:
07 August 2025
Manuscript revised:
15 August 2025
Accepted for publication:
16 August 2025

Keywords

sustainable tourism,
community welfare,
local development,
eco-tourism,
community-based tourism

Abstract

This article explores the role of sustainable tourism development in enhancing the welfare of local communities. Sustainable tourism emphasizes the long-term preservation of natural and cultural resources while providing economic benefits to the host population. The purpose of this research is to analyze how tourism strategies rooted in sustainability principles contribute to improving community income, employment opportunities, and environmental stewardship. The study applies a qualitative descriptive approach with a case study in the coastal village of Sesaot, Lombok, Indonesia. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and were then examined using interactive analysis techniques. The findings indicate that sustainable tourism initiatives—such as community-based tourism and eco-tourism—have significantly increased local participation, diversified income sources, and raised environmental awareness. However, challenges such as limited infrastructure and institutional support still persist. This paper concludes that sustainable tourism is a viable strategy to promote inclusive economic development, especially in rural or natural destinations. Strengthening collaboration between stakeholders and consistent policy support are essential to sustain the long-term benefits.

Copyright © 2025, The Author(s)
This is an open access article under the CC BY-SA license

How to Cite: Ardhiatma, F. (2025). Peran Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. *Tourism and Hospitality Research, 1*(1), 23–29. https://doi.org/10.70716/thr.v1i1.56

Pendahuluan

Pariwisata berkelanjutan telah menjadi paradigma utama dalam pengembangan destinasi wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap berbagai dampak negatif dari model pembangunan pariwisata konvensional yang cenderung eksploitatif dan kurang memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan maupun keberlangsungan budaya lokal. Berbeda dari pendekatan konvensional yang hanya berorientasi pada pertumbuhan jumlah wisatawan dan keuntungan finansial jangka pendek, pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara kepentingan industri pariwisata, pelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat lokal (Gössling, 2000). Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor wisata, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara bijak agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Pendekatan ini juga berupaya memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata tidak hanya terkonsentrasi pada investor besar atau pihak luar, melainkan dapat didistribusikan secara adil kepada komunitas lokal. Selain itu, pariwisata berkelanjutan mendorong praktik wisata yang ramah lingkungan, misalnya melalui pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan konservasi biodiversitas. Dari sisi sosial, prinsip ini juga mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya setempat dan pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan wisata.

Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan tidak sekadar menjadi jargon pembangunan, tetapi telah menjadi kerangka konseptual dan operasional yang digunakan dalam kebijakan dan praktik pengelolaan destinasi di berbagai negara. Implementasinya mencakup strategi-strategi seperti pengembangan ekowisata, community-based tourism (CBT), dan penggunaan indikator keberlanjutan dalam evaluasi dampak pariwisata. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengembangkan pariwisata secara bertanggung jawab, pendekatan berkelanjutan menjadi landasan yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kesenjangan sosial.

Banyak penelitian menyatakan bahwa pengembangan pariwisata memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian lokal, terutama di daerah pedesaan atau terpencil yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sektor-sektor ekonomi formal (Ashley et al., 2000). Pariwisata sering kali dipandang sebagai salah satu sektor strategis yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, membuka peluang usaha mikro dan kecil, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor ini memiliki multiplier effect yang kuat terhadap sektor lain seperti pertanian, perikanan, transportasi, dan kerajinan tangan. Namun, potensi ini tidak akan secara otomatis memberikan dampak positif apabila masyarakat lokal hanya dijadikan sebagai objek atau pelengkap dalam sistem pariwisata yang didominasi oleh investor eksternal. Untuk memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, masyarakat setempat harus diberdayakan sebagai subjek aktif dan pemilik dari proses pembangunan pariwisata. Pemberdayaan ini mencakup penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya penting dalam aspek ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat identitas budaya, menjaga kelestarian lingkungan, dan membangun rasa memiliki terhadap destinasi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar utama dalam kerangka pariwisata berkelanjutan yang menekankan pada keadilan sosial dan pemerataan manfaat.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara keberhasilan implementasi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di berbagai konteks geografis. Penelitian oleh Scheyvens (1999) menekankan pentingnya pendekatan community-based tourism (CBT) sebagai model pengembangan pariwisata yang menempatkan komunitas sebagai pusat dari seluruh aktivitas wisata. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai perencana, pelaksana, dan pengelola kegiatan pariwisata. CBT memungkinkan komunitas untuk memanfaatkan aset lokal—baik alam, budaya, maupun sosial—sebagai daya tarik wisata, sambil tetap menjaga integritas dan keberlanjutan sumber daya tersebut. Lebih jauh, CBT juga mendorong terjadinya proses pembelajaran kolektif, penguatan jejaring sosial, serta peningkatan kapasitas lokal melalui pelatihan, kerja sama, dan inovasi. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa komunitas yang menerapkan model CBT secara konsisten mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga, penguatan struktur kelembagaan lokal, serta peningkatan kualitas hidup secara umum (Zhou et al., 2020; Salazar, 2012). Namun demikian, efektivitas CBT sangat bergantung pada dukungan kebijakan, akses terhadap pasar, serta keberlanjutan kelembagaan komunitas. Tanpa elemen-elemen tersebut, CBT berisiko menjadi hanya sebuah slogan tanpa dampak riil terhadap kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan, terutama dalam konteks negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan struktural dan sistemik. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kapasitas institusional, di mana lembaga-lembaga pemerintah maupun organisasi lokal sering kali belum memiliki sumber daya manusia, finansial, maupun teknis yang memadai untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi aktivitas pariwisata secara berkelanjutan. Kurangnya pelatihan, lemahnya koordinasi antar instansi, dan minimnya data yang valid menjadi penghambat dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, akses masyarakat lokal terhadap modal dan pendanaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha wisata secara mandiri masih sangat terbatas. Ketiadaan jaminan atau aset yang diakui secara legal, serta prosedur birokrasi yang rumit, membuat masyarakat sulit memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal.

Tidak kalah penting adalah adanya konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, yang sering kali terjadi akibat tidak sinkronnya visi pembangunan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, kepentingan ekonomi jangka pendek dari investor besar lebih diutamakan, sementara aspirasi dan kebutuhan masyarakat diabaikan. Hal ini dapat menyebabkan marginalisasi komunitas lokal dari manfaat pariwisata, bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Gössling dan Hall (2006), kegagalan dalam membangun tata kelola pariwisata yang inklusif dan transparan menjadi salah satu penyebab utama gagalnya implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, untuk menjembatani kesenjangan ini, dibutuhkan reformasi kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan kolaborasi multipihak yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: sejauh mana pengembangan pariwisata berkelanjutan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan dalam konteks pergeseran paradigma pembangunan pariwisata yang kini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan pentingnya pemerataan manfaat dan pelestarian sumber daya lokal. Selain itu, penelitian ini juga ingin menggali lebih dalam mengenai apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sektor pariwisata, khususnya di tingkat komunitas. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam komunitas itu sendiri, seperti kapasitas organisasi, modal sosial, dan tingkat partisipasi masyarakat, maupun dari luar, seperti dukungan kebijakan, kondisi infrastruktur, hingga dinamika pasar wisata.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara sistematis dan kontekstual, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan sektor pariwisata di tingkat lokal. Kontribusi teoretisnya terletak pada penguatan kerangka pemikiran mengenai hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui lensa community-based tourism dan ekowisata. Sementara kontribusi praktisnya adalah dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan relevan, yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, pengelola destinasi, maupun komunitas lokal dalam merancang strategi pengembangan wisata yang berkelanjutan, adil, dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik dalam mewujudkan sektor pariwisata yang benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran pariwisata berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui studi kasus di kawasan wisata Sesaot, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini dipilih karena merupakan salah satu destinasi wisata berbasis alam yang telah mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, namun juga menghadapi tantangan yang kompleks dalam implementasinya. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada dampak ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan lingkungan sebagai satu

kesatuan sistem yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bersifat holistik dan kontekstual agar mampu menangkap dinamika nyata yang terjadi di lapangan.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik pariwisata berkelanjutan telah diterapkan, siapa saja aktor yang terlibat dalam prosesnya, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat lokal, serta bagaimana persepsi mereka terhadap manfaat dan tantangan yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keterkaitan antara praktik keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, baik dari segi ekonomi (misalnya pendapatan dan lapangan kerja), sosial (misalnya kohesi sosial dan penguatan identitas lokal), maupun lingkungan (misalnya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam).

Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat argumen bahwa keberlanjutan dalam pariwisata tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebatas pelestarian lingkungan alam, tetapi harus mencakup dimensi keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Keberlanjutan sejati adalah ketika seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat lokal, memiliki akses, kontrol, dan manfaat yang proporsional dari pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, artikel ini juga berusaha menyoroti pentingnya pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas dalam perencanaan serta pengelolaan destinasi wisata agar pariwisata benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Kontribusi utama dari artikel ini terletak pada pendekatan kontekstual terhadap implementasi pariwisata berkelanjutan di tingkat komunitas, yang hingga kini masih jarang menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian pariwisata di Indonesia. Pendekatan kontekstual ini berarti bahwa setiap bentuk pengembangan pariwisata harus disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, serta ekologi dari komunitas lokal yang bersangkutan. Artikel ini tidak hanya mengandalkan teori-teori umum tentang keberlanjutan, tetapi juga mengintegrasikannya dengan kondisi riil di lapangan melalui studi kasus yang konkret. Melalui pemahaman atas dinamika lokal—seperti struktur sosial, bentuk kepemimpinan tradisional, sistem nilai masyarakat, hingga akses terhadap sumber daya—artikel ini mampu mengungkap bagaimana keberhasilan atau kegagalan pariwisata berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh konteks spesifik suatu wilayah.

Dengan menggali dinamika lokal secara mendalam, artikel ini memberikan wawasan yang lebih tajam dan aplikatif bagi pengambil kebijakan serta praktisi pariwisata dalam merancang strategi pembangunan wisata yang inklusif, relevan, dan adaptif terhadap realitas masyarakat setempat. Hal ini penting mengingat bahwa kebijakan yang bersifat top-down tanpa mempertimbangkan realitas lokal sering kali gagal menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kontribusi penting dalam membangun narasi alternatif pengembangan pariwisata—yaitu narasi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek dari program-program wisata. Dengan menekankan pentingnya pemetaan partisipatif, dialog antar-pemangku kepentingan, dan penyesuaian kebijakan dengan nilai-nilai lokal, artikel ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik sekaligus mendorong transformasi praksis dalam kebijakan dan perencanaan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus sebagai desain utamanya. Lokasi penelitian adalah Desa Wisata Sesaot, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena desa ini dikenal sebagai salah satu destinasi ekowisata yang dikelola oleh komunitas lokal. Pengumpulan data dilakukan selama bulan Mei hingga Juli 2025. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan 15 informan kunci (tokoh masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah desa), observasi partisipatif, serta dokumentasi kegiatan

wisata dan kebijakan lokal. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Sesaot telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dampak ini terlihat dari semakin beragamnya sumber pendapatan yang dapat diakses oleh warga, di antaranya melalui penyewaan homestay yang dikelola secara mandiri oleh keluarga-keluarga lokal, penyediaan jasa pemandu wisata yang mengedepankan interpretasi lingkungan dan budaya, serta penjualan produk lokal seperti kerajinan tangan berbahan alami, anyaman tradisional, dan makanan khas daerah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Aktivitas-aktivitas ini memberikan peluang kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan perputaran uang di tingkat lokal.

Peningkatan pendapatan ini tidak hanya berdampak positif pada kesejahteraan individu dan keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli desa (PADes). Dana yang terkumpul dari aktivitas pariwisata digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan desa, seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas umum, pengelolaan kebersihan lingkungan, dan pelestarian area hutan wisata. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari pariwisata berkelanjutan di Desa Sesaot bersifat ganda: memperkuat perekonomian rumah tangga sekaligus memperkuat kapasitas fiskal desa untuk membiayai program pembangunan dan konservasi.

Lebih lanjut, perkembangan ini turut memicu tumbuhnya sektor pendukung lainnya seperti transportasi lokal, penyediaan peralatan wisata, hingga jasa kuliner yang melibatkan kelompok usaha bersama (KUB) dan koperasi desa. Keterlibatan masyarakat dalam rantai ekonomi pariwisata ini mendorong terciptanya siklus ekonomi yang inklusif, di mana keuntungan yang diperoleh tidak hanya terpusat pada segelintir pihak, melainkan terdistribusi secara merata di antara warga desa. Hal ini memperkuat posisi pariwisata berkelanjutan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Desa Sesaot.

Dari sisi sosial, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata telah menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap destinasi serta memperkuat kohesi sosial di antara warga. Keterlibatan ini memunculkan kesadaran kolektif bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata merupakan tanggung jawab bersama, sehingga mendorong terjadinya kerja sama lintas kelompok masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, kelompok perempuan, dan pelaku usaha lokal. Rasa memiliki tersebut tercermin dalam partisipasi sukarela warga dalam kegiatan seperti kerja bakti membersihkan area wisata, menjaga keamanan lingkungan, serta menyambut wisatawan dengan keramahan yang merepresentasikan identitas budaya lokal.

Program pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh LSM maupun pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam proses ini. Melalui pelatihan tersebut, masyarakat memperoleh keterampilan teknis seperti manajemen homestay, pelayanan wisata berbasis keramahan (hospitality), teknik pemanduan yang mengedepankan interpretasi lingkungan dan budaya, hingga pengelolaan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, dan recycle. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan membantu memastikan bahwa keterampilan ini dapat diaplikasikan secara konsisten, sehingga pengelolaan destinasi tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan tetapi juga mempertahankan kualitas lingkungan dan nilai-nilai budaya setempat.

Upaya ini sejalan dengan temuan Jamal & Getz (1995) yang menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kolaborasi tersebut tidak hanya mencakup masyarakat lokal dan pemerintah, tetapi juga pihak swasta, akademisi,

dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepentingan dan peran masing-masing. Di Desa Sesaot, kolaborasi ini terlihat dari adanya forum komunikasi rutin yang membahas pengelolaan wisata, pembagian peran, serta penyelesaian permasalahan yang muncul. Dengan demikian, aspek sosial dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan bukan hanya membangun solidaritas internal masyarakat, tetapi juga membentuk jejaring kerja sama yang lebih luas, yang pada akhirnya memperkuat fondasi keberlanjutan destinasi tersebut.

Namun, meskipun pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan ini menunjukkan tren positif, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya dalam aspek infrastruktur dasar. Akses jalan menuju destinasi wisata di beberapa titik masih sempit dan belum sepenuhnya beraspal, sehingga menyulitkan mobilitas wisatawan, terutama pada musim hujan ketika kondisi jalan menjadi licin dan rawan kerusakan. Keterbatasan jaringan internet juga menjadi hambatan, mengingat konektivitas digital merupakan faktor penting dalam promosi destinasi, pemesanan layanan wisata secara daring, serta komunikasi antara wisatawan dengan penyedia jasa lokal. Selain itu, fasilitas sanitasi seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, dan sistem pengelolaan limbah belum sepenuhnya memadai, sehingga berpotensi menurunkan kenyamanan pengunjung dan menciptakan dampak negatif terhadap lingkungan.

Di sisi lain, distribusi manfaat ekonomi dari pariwisata masih belum merata di kalangan warga. Sebagian besar keuntungan cenderung dinikmati oleh kelompok yang memiliki modal, aset, atau akses jaringan yang lebih baik, seperti pemilik homestay, pelaku usaha jasa wisata, atau pedagang di sekitar area utama destinasi. Sementara itu, warga yang tidak memiliki keterampilan khusus atau modal usaha seringkali hanya memperoleh manfaat secara tidak langsung, atau bahkan tidak sama sekali. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi di dalam komunitas yang, jika dibiarkan berlarut-larut, berpotensi memicu kecemburuan sosial dan konflik internal.

Seperti yang diungkapkan oleh Tosun (2000), ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat pariwisata merupakan salah satu sumber utama resistensi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, terutama jika mereka merasa tidak dilibatkan atau tidak memperoleh keuntungan yang sepadan dengan dampak yang mereka rasakan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme distribusi manfaat yang lebih adil dan transparan, misalnya melalui pembentukan koperasi desa wisata, sistem bagi hasil yang disepakati bersama, atau program pemberdayaan ekonomi yang menyasar kelompok rentan dan masyarakat yang belum terlibat aktif dalam sektor pariwisata. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi potensi konflik sosial, memperkuat rasa kebersamaan, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari keberadaan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut..

Dalam perspektif lingkungan, kegiatan pariwisata di Sesaot relatif ramah lingkungan karena didasarkan pada prinsip konservasi. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain penanaman pohon, pelatihan pengelolaan sampah organik dan non-organik, serta edukasi lingkungan bagi wisatawan. Praktik ini mendukung teori ecotourism yang dikemukakan oleh Weaver (2001), yang menekankan pada pengalaman wisata berbasis pelestarian dan pendidikan.

Secara umum, penelitian ini memperkuat gagasan bahwa pengembangan pariwisata yang dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan ini membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten, alokasi anggaran yang memadai, serta sinergi antar pihak.

Kesimpulan

Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Sesaot menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dampak positif terlihat dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci utama dalam menciptakan pariwisata yang

inklusif dan berkeadilan. Meski demikian, tantangan struktural dan distribusi manfaat yang belum merata masih perlu diatasi. Untuk itu, diperlukan strategi kolaboratif jangka panjang antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi peran digitalisasi dalam memperkuat keberlanjutan sektor pariwisata di desa wisata.

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sesaot, para informan yang telah bersedia berbagi informasi, serta Universitas Mataram yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Ashley, C., Boyd, C., & Goodwin, H. (2000). Pro-poor tourism: Putting poverty at the heart of the tourism agenda. Natural Resource Perspectives, 51(1), 1–6.

Dredge, D., & Jenkins, J. (2007). Tourism planning and policy. John Wiley & Sons Australia.

Gössling, S. (2000). Sustainable tourism development in developing countries: Some aspects of energy use. Journal of Sustainable Tourism, 8(5), 410–425. https://doi.org/10.1080/09669580008667374

Gössling, S., & Hall, C. M. (2006). Tourism and global environmental change: Ecological, social, economic and political interrelationships. Routledge.

Honey, M. (1999). Ecotourism and sustainable development: Who owns paradise? (2nd ed.). Island Press.

Jamal, T., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. Annals of Tourism Research, 22(1), 186–204. https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00067-3

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.

Mowforth, M., & Munt, I. (2015). Tourism and sustainability: Development, globalisation and new tourism in the third world (4th ed.). Routledge.

Murphy, P. (2013). Tourism: A community approach (RLE Tourism). Routledge.

Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. Tourism Management, 20(2), 245–249. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7

Simpson, M. C. (2008). Community benefit tourism initiatives—A conceptual oxymoron? Tourism Management, 29(1), 1–18. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.06.005

Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. Tourism Management, 21(6), 613–633. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00005-1

Weaver, D. (2001). The encyclopedia of ecotourism. CABI Publishing.